



Eksistensi Nilai Kewarganegaraan Ekologis Berbasis Kearifan Lokal di Masyarakat Pesisir Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Mariatul Kiptiah^{a,1*}, Wahyu^{a, 2}, Zainul Akhyar^{a,3}, Muhammad Elmy^{a, 4}, Nurul Huda^{a,5}

^a Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

¹mariatulkiptiah@ulm.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2025;

Revised: 3 Januari 2025;

Accepted: 30 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Nilai Moral;
Etika Lingkungan;
Kewarganegaraan Ekologis;
Kearifan Lokal;
Masyarakat Pesisir.

ABSTRAK

Kebudayaan Indonesia adalah seluruh budaya lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Eksistensi berarti adanya sesuatu yang ada, sesuatu yang mempunyai kenyataan, sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada untuk menjadi sempurna. Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Penelitian ini bertujuan mendalamai fenomena alam dan keberadaan sumber daya alam dalam mengkonstruksi nilai kewarganegaraan ekologis berbasis kearifan lokal di masyarakat pesisir. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir mempraktikkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan pemanfaatan limbah menjadi penghasilan tambahan. Kearifan lokal tercermin dari penggunaan alat tradisional seperti sampan dan jaring, memastikan eksplorasi sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai identitas moral masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah, masyarakat dan para ilmuwan terus berupaya menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pesisir yaitu gotong-royong dan kerjasama dengan melibatkan generasi muda dalam menciptakan dan memelihara kearifan lokal melalui pendidikan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kesadaran terhadap lingkungan hidup.

ABSTRACT

The Existence of Ecological Citizenship Values Based on Local Wisdom in Coastal Communities of Tanah Laut Regency, South Kalimantan. Indonesian culture is all local cultures that exist in every region in Indonesia. Existence means the existence of something that exists, something that has reality, something that is experienced and emphasizes that something exists to be perfect. Tanah Laut Regency is one of the regencies in South Kalimantan province that has tourism, agriculture, fisheries, and mining potential. This study aims to explore natural phenomena and the existence of natural resources in constructing ecological citizenship values based on local wisdom in coastal communities. Using a qualitative approach with a phenomenological method, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that coastal communities practice the values of togetherness, mutual cooperation, and the utilization of waste into additional income. Local wisdom is reflected in the use of traditional tools such as boats and nets, ensuring that the exploitation of natural resources does not damage the environment. These values function as the moral identity of the community in maintaining the balance of the ecosystem. The government, society and scientists continue to strive to maintain and uphold the values of local wisdom of coastal communities, namely mutual cooperation and cooperation by involving the younger generation in creating and maintaining local wisdom through education to achieve common goals in maintaining awareness of the environment.

Copyright © 2025 (Mariatul Kiptiah, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Kiptiah, M., Wahyu, W., Akhyar, Z., Elmy, M., & Huda, N. (2025). Eksistensi Nilai Kewarganegaraan Ekologis Berbasis Kearifan Lokal di Masyarakat Pesisir Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 176–182. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11364>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai bangsa yang majemuk, memiliki keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam memperkuat persatuan bangsa. Sebagai negara kesatuan, prinsip persatuan yang diwujudkan melalui ekonomi nasional, hukum nasional, dan bahasa nasional sangat penting untuk menjaga kesatuan negara (Yusuf, 2020b). Namun, globalisasi yang membawa perubahan signifikan dalam budaya lokal menuntut penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan (T. Suryani, 2021). Fenomena ini juga berlaku di Kabupaten Tanah Laut, yang kaya akan potensi alam dan budaya, namun menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas lokal di tengah perubahan global.

Kabupaten Tanah Laut, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki berbagai potensi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Potensi besar ini memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ekosistem pesisir dan perairan yang ada di daerah ini juga menyimpan sumber daya alam yang besar, meskipun sebagian besar hasil perikanan masih dijual dalam bentuk primer, yang mengurangi nilai tambah bagi masyarakat (Nafarin, 2017). Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian dan perikanan harus mengedepankan kebijakan holistik yang melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga masyarakat (Wahyu, 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan gagasan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*), yang menghubungkan identitas moral individu dengan lingkungan sekitar. Isin & Turner (2022) menyatakan bahwa kewarganegaraan ekologis sangat selaras dengan pandangan Barat mengenai kehidupan manusia yang utuh, di mana individu berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, kearifan lokal yang menghargai lingkungan alam harus dipertahankan agar tetap relevan dalam menghadapi globalisasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dengan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut. Mengingat daerah ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan secara lebih efisien, riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep kewarganegaraan ekologis dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir, serta bagaimana masyarakat setempat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas lokal mereka.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu wilayah di provinsi Kalimantan Selatan, ibu kota kabupatennya adalah kota Pelaihari, yang terletak sekitar 60 km dari kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Secara administratif Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 135 desa. Kabupaten Tanah Laut mempunyai potensi daerah yang baik yaitu pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan. Potensi pertanian, peternakan, dan perikanan dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan di kawasan Minapolitan, yaitu kawasan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang ditunjukkan dengan adanya keterhubungan fungsional dan hierarki spasial permukiman unit dan sistem minabisnis berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 (Ubadiyah, 2022).

Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan penerapan kewarganegaraan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Tanah Laut, dengan menyoroti potensi daerah yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus utama penelitian ini adalah

untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat pesisir dapat memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, serta mengatasi tantangan globalisasi yang dapat mempengaruhi identitas dan keberlanjutan budaya lokal mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung sinergi antara kebijakan pembangunan, kearifan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Yusuf (2020) mengungkapkan pentingnya prinsip persatuan dalam menghadapi keragaman Indonesia, yang menjadi landasan dalam pengelolaan keberagaman dan persatuan bangsa. Suryani (2021) meneliti dampak globalisasi terhadap budaya lokal di Indonesia, serta bagaimana perubahan ini mengarah pada perlunya penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nafarin (2017) mengkaji pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian dan perikanan, serta pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan identitas lokal di tengah globalisasi. Yusuf (2020) menekankan pentingnya prinsip persatuan dalam menghadapi keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya Indonesia, yang menjadi dasar dalam pengelolaan keberagaman untuk memperkuat kesatuan bangsa. Suryani (2021) mengkaji dampak globalisasi terhadap budaya lokal, yang menciptakan pergeseran nilai dan identitas budaya yang menuntut penyesuaian dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, Nafarin (2017) meneliti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, guna mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian tersebut karena berfokus pada penerapan konsep kewarganegaraan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Tanah Laut, dengan menyoroti peran kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan identitas lokal, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis di kalangan masyarakat pesisir, namun dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap tantangan yang dihadapi oleh daerah pesisir di Kalimantan Selatan.

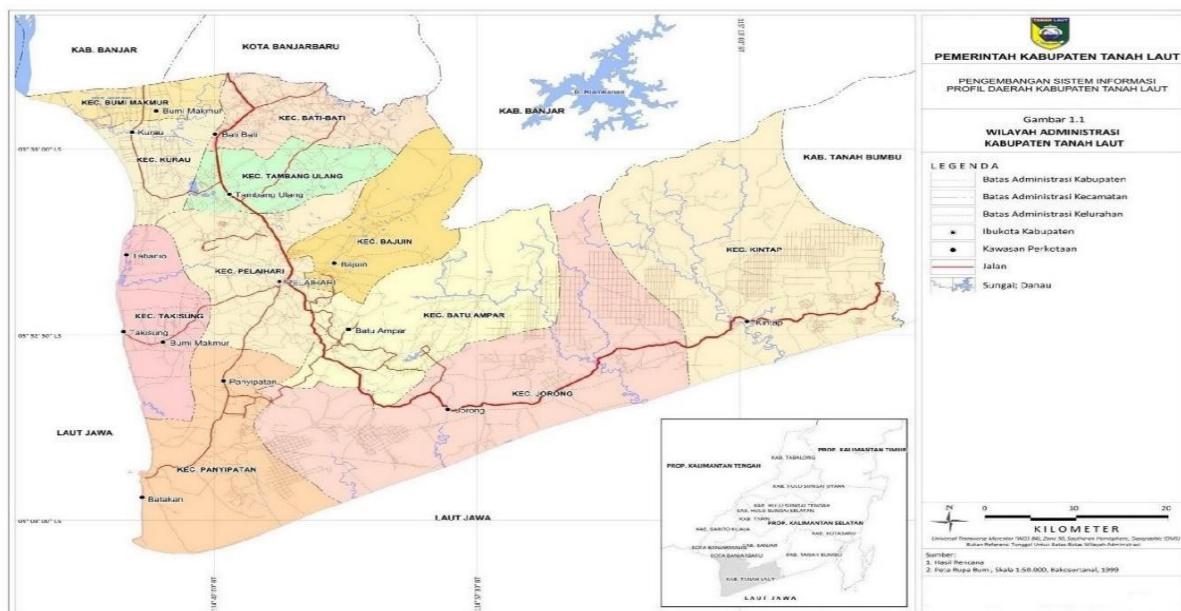
Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan masyarakat pesisir dan peran budaya mereka dalam konteks kewarganegaraan ekologis berbasis pengetahuan lokal. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi terkait kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat pesisir. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara dan lembar observasi yang dirancang untuk menggali perspektif masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan fokus pada pola-pola yang muncul dalam hubungan antara pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi globalisasi. Penggunaan metode penelitian kualitatif mempengaruhi keputusan mengenai lokasi penelitian dan informan. Sampel informan diidentifikasi menggunakan purposive sampling karena informan merupakan anggota masyarakat pesisir dengan adanya kewarganegaraan lingkungan

yang berbasis pada pengetahuan lokal. Masyarakat pesisir terdiri dari petani, nelayan, pedagang, ilmuwan dan pemerintah daerah.

Hasil dan pembahasan

Kabupaten Tanah Laut, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari, memiliki luas wilayah 3.631,35 km². Secara geografis, wilayah ini terletak antara 114° 30' 22" - 115° 10' 30" BT dan 3° 30' 3" - 4° 10' 30" LS. Kabupaten ini memiliki posisi strategis, berbatasan langsung dengan Banjarmasin dan Laut Jawa, serta dilengkapi dengan pelabuhan dan pantai yang mendukung jalur distribusi barang. Dengan kekayaan ekosistem pesisirnya, Tanah Laut menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam



pesisir untuk kehidupan sehari-hari mereka.

Gambar: 1. Letak Geografis

Pengelolaan sumber daya pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan, dengan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan fungsi ekosistem sebagai landasan utama. Masyarakat pesisir memanfaatkan kearifan lokal yang ramah lingkungan, seperti penggunaan alat-alat sederhana dalam penangkapan ikan, guna menjaga kelestarian lingkungan laut. Selain itu, mereka menjalankan nilai-nilai sosial seperti persatuan dan gotong royong dalam aktivitas sehari-hari, seperti bekerja bersama dalam kelompok kecil saat melaut. Masyarakat pesisir juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengumpulkan sampah dan merawat ekosistem pesisir. Kearifan lokal ini mendorong keberlanjutan sosial dan ekologis, serta menjadi dasar dari kewarganegaraan ekologis yang menghubungkan kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian lingkungan.

Berkes (2012) menyatakan bahwa dalam mendukung keberlanjutan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir maka diperlukan konsep ekologi tradisional yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Kemudian Rockstrom et al (2009) menyatakan bahwa dalam perspektif ekologi, keberlanjutan sosial dan ekologis dalam pengelolaan pesisir dapat dicapai jika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan. Keberlanjutan ini dapat tercermin dalam pola hidup masyarakat yang saling mendukung dan menjaga keseimbangan nilai-nilai kearifan lokal

dalam mengelola lingkungan. Adapun beberapa nilai kearifan lokal yang peneliti temukan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir, yaitu:

Tabel 1. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir

Nilai	Deskripsi	Contoh Implementasi
Ramah Lingkungan	Penggunaan alat-alat sederhana yang tidak merusak lingkungan	Penggunaan sampan dan jaring dalam menangkap ikan
Gotong Royong	Kerjasama antar masyarakat pesisir dalam kegiatan melaut	4 hingga 6 orang melaut bersama dalam satu perahu
Pengelolaan Berkelaanjutan	Kesadaran untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kebersihan lingkungan	Daur ulang sampah dan pelestarian karang

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa nilai penting yang ada dalam kehidupan masyarakat pesisir yang berperan dalam mendukung kewarganegaraan ekologis. Berikut adalah poin-poin utama yang ditemukan: (a) Ramah Lingkungan: Masyarakat pesisir menggunakan alat-alat sederhana dalam aktivitas menangkap ikan, seperti sampan dan jaring, yang tidak merusak lingkungan laut sekitar. Keberlanjutan ekosistem pesisir dijaga dengan prinsip-prinsip penggunaan teknologi ramah lingkungan; (b) Gotong Royong dan Kerjasama Sosial: Kehidupan sosial di masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebersamaan. Biasanya, mereka melaut dalam kelompok kecil, dengan 4 hingga 6 orang yang berperan dalam satu perahu. Hal ini memperkuat hubungan sosial dan kerja sama antar anggota masyarakat. (c) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelaanjutan: Masyarakat pesisir menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir dengan cara mendaur ulang sampah dan menjaga karang-karang di sekitar pantai. Ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi mereka, yang juga mengandung nilai kewarganegaraan ekologis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pesisir menganggap kearifan lokal sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam wawancara dengan beberapa informan, mereka menegaskan bahwa alat yang digunakan untuk melaut sangat sederhana dan tidak merusak ekosistem laut. Salah satu informan menyatakan, "Kami selalu menggunakan alat yang tidak merusak terumbu karang dan kami menjaga lingkungan agar tetap bersih". Observasi menunjukkan adanya kegiatan gotong royong di antara nelayan pesisir, yang saling membantu dalam menangkap ikan serta mengelola sampah yang dihasilkan. Masyarakat juga terlibat dalam pengumpulan sampah yang dibuang oleh pengunjung pantai, mendaur ulangnya, dan mengubahnya menjadi pendapatan tambahan.

Sejalan dengan hal diatas, Latta & Wittman (2012) juga menegaskan bahwa dalam konsep kewarganegaraan ekologis sangat relevan dalam keterkaitan antara hal dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan. Masyarakat pesisir yang menerapkan kearifan lokal secara tidak langsung menunjukkan bentuk kewarganegaraan ekologis yang dapat dilihat melalui perannya dalam pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Dalam konteks masyarakat pesisir, kewarganegaraan lingkungan (*environmental citizen*) juga merupakan suatu gagasan yang dikaitkan dengan identitas moral atau etika warga negara dalam hubungannya dengan lingkungan hidup. Konsep kewarganegaraan lingkungan ditawarkan sebagai solusi untuk menjawab masalah krisis lingkungan diwilayah pesisir. Kewarganegaraan lingkungan juga membentuk keseimbangan kepribadian setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, Dean Curtin (dalam Isin dan Turner, 2002: 297) menyatakan bahwa "gagasan

kewarganegaraan lingkungan sangat menjanjikan karena sangat selaras dengan gagasan Barat tentang apa artinya menjalani kehidupan manusia seutuhnya”.

Wahyu (2016) juga menyatakan bahwa keterkaitan ekologis yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan di kawasan pesisir dengan sumber daya pendidikan bagi masyarakat yang memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perlunya penguatan pendidikan kearifan lokal yang bertujuan untuk memperkuat komunitas nelayan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat usia produktif. Hal tersebut memperkuat bahwa kewarganegaraan ekologis tidak hanya mengkaji tentang bagaimana manusia sebagai individu yang memiliki identitas diri (*moral identity*), beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya baik dalam kapasitas internal (aktivitas), menerima kekuasaan dari komunitas, maupun secara eksternal dengan membentuk/berpartisipasi dalam pembentukan suatu tatanan konstitutif masyarakat, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Pemanfaatan sumber daya pesisir diharapkan tidak menimbulkan kerusakan pada daerah penangkapan ikan, daerah pemijahan, atau daerah asuhan; selain itu juga tidak mengganggu fungsi ekosistem hutan bakau (*mangrove*), dan terumbu karang.

Berdasarkan data yang ditemukan, kewarganegaraan ekologis di masyarakat pesisir Tanah Laut dapat dijelaskan melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Masyarakat pesisir telah membentuk sistem sosial yang erat dengan alam, di mana interaksi antara manusia dan lingkungan tetap dijaga agar tidak merusak ekosistem. Kerjasama antar individu, melalui gotong royong dalam kegiatan melaut, juga menguatkan prinsip kewarganegaraan ekologis, yang tidak hanya mengutamakan manfaat individu tetapi juga keberlanjutan bersama. Kearifan lokal ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan globalisasi tanpa kehilangan identitas budaya dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kearifan ekologis dapat diwujudkan melalui nilai-nilai sosial, norma-norma tradisional, etika, sistem kepercayaan, model penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Kearifan ekologis juga dapat menjadi sumber daya sosial yang diwariskan secara turun-temurun terbukti ampuh dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan lingkungan sosial. Membangun dan memelihara kewarganegaraan ekologis dalam komunitas pesisir yang berkelanjutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga gaya hidup, bisnis, perekonomian, struktur fisik, dan teknologi tidak mengganggu kemampuan alam untuk mendukung kehidupan. Langkah besar dalam upaya ini adalah memahami prinsip pengorganisasian ekosistem sebagai jaringan kehidupan. Masyarakat yang berwawasan lingkungan tidak hanya menghargai lingkungan, namun juga menghargai kehidupan itu sendiri. Kesadaran lingkungan tidak hanya sekedar menciptakan sesuatu yang indah atau bersih, tetapi juga mencakup tanggung jawab seseorang untuk menghormati hak orang lain (Subagio, 1999: 17). Merupakan hak orang lain untuk menikmati dan merasakan keseimbangan alam yang murni. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini, tindakan-tindakan yang hanya bersifat destruktif harus dihindari. Budaya lokal harus tetap hidup dan berkembang mengikuti perkembangan zaman serta mengikuti arus peristiwa global, dengan tetap menjaga kemampuan mempertahankan jati diri lokal sebagai budaya lokal.

Simpulan

Penelitian ini menekankan eksistensi kewarganegaraan ekologis berbasis kearifan lokal di masyarakat pesisir sebagai identitas moral yang mendalam terhadap lingkungan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan ekologis tidak hanya terbatas pada pemahaman, tetapi juga tercermin dalam praktik sehari-hari yang ramah lingkungan, seperti penggunaan alat-alat sederhana dalam aktivitas melaut, serta penerapan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan dan gotong royong. Keunikan temuan penelitian ini terletak pada peran kearifan lokal yang tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis di antara anggota masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam memahami bagaimana konsep kewarganegaraan ekologis dapat diterapkan melalui prinsip-prinsip lokal dalam konteks masyarakat pesisir. Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan teori kewarganegaraan ekologis berbasis komunitas pesisir yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan kondisi sosial dan ekologi yang serupa. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh pendidikan ekologis berbasis kearifan lokal terhadap perilaku generasi muda di masyarakat pesisir.

Referensi

- Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology*: Fourth Edition. Routledge.
- Isin, E.F., & Turner, B. . (Eds. . (2022). *Handbook of Citizenship Studies*. SAGE Publications.
- Latta & Wittman. (2012). *Environment and Citizenship in Latin America: Natures, Subjects, and Struggles*. Berghan Books.
- Nafarin, M. (2017). *Pembangunan Berkelaanjutan di Sektor Pertanian dan Perikanan : Strategi untuk Daerah Pesisir*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Robert, L. Perspective . Diterjemahkan. Jakarta: PT. Gramedia.
- Robbins, Stephen. P. (2003). Perilaku Organisasi . Jakarta: Gramedia.
- Rockstrom, et al. (2009). *Planetary Boundaries: Exploring the safe Operating Space for Humanity*. *Ecology and Society*, 14(2). 32.
- Subagio, Sastrowardoyo. (1986). Kepribadian Sangat Penting dalam Karya Seni , Harian Terbit, 8 Agustus 1986, hal. 7 dan 10.
- Sumiyati Sa'adah. (2018). *Sistem peredaran darah manusia*. Program studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah an Keguruan UIN Sunan Gunung Djati. Bandung: 2018
- Suryani, L. (2021). Dampak globalisasi terhadap budaya lokal: Pergeseran nilai dan identitas budaya. *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(3), 145–160.
- Suryani, T. (2021). *Dampak Globalisasi terhadap Budaya Lokal di Indonesia*. Jakarta: Nusantara.
- Ubadiyah, F. (2022). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2022*.
- Yusuf, A. (2020). Prinsip persatuan dalam menghadapi keragaman di Indonesia: Pendekatan multikultural untuk memperkuat kesatuan bangsa. *Jurnal Multikultural Indonesia*, 12(3), 45–58.
- Yusuf, A. (2020). *Prinsip Persatuan dalam menghadapi keragaman Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nasional.
- Wahyu. (2020). *Penguatan Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal*. Penelitian ULM: LPPM ULM.
- Wahyu. (2007). Penyuluhan tentang peranan Pendidikan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan Pedesaan di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado Kab HSS . Pengabdian/Penelitian ULM: LPPM ULM.